

## C.5 BELANJA ADMINISTRASI UMUM (EX BAU)

Belanja Administrasi Umum merupakan gabungan 2 program yang bersifat mendukung kelancaran pelaksanaan program-program di seluruh Perangkat Daerah yaitu: Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah dan Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

### a. Realisasi Indikator Kinerja Program

Non Urusan (Ex BAU) dilaksanakan melalui 2 program, yaitu Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah dan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terdistribusi kedalam 13 Indikator Kinerja Program. Perincian ketercapaian dari 13 Indikator tersebut disajikan dalam Lampiran Indikator Kinerja Program Urusan EX BAU L.I.D.6.1-37.

Dari Lampiran Indikator Kinerja Program Urusan EX BAU L.I.D.6.1-37 dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah memiliki 222 indikator yang seluruhnya memiliki tingkat ketercapaian sangat tinggi; 2) Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah memiliki 33 indikator yang seluruhnya memiliki tingkat ketercapaian sangat tinggi.

Secara keseluruhan, semua indikator memiliki tingkat ketercapaian sangat tinggi. Uraian berkaitan dengan indikator umum dan tingkat ketercapaiannya disajikan dalam Tabel berikut ini:

No	Nama Program	Jumlah Indikator	Tingkat Ketercapaian				
			Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat rendah
1	Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	222	222		-	-	
2	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33	33	-	-	-	
Jumlah		255	255	-	-	-	

Keterangan:

Tingkat Ketercapaian Kinerja dihitung dengan kategori sebagai berikut:

- 1) Sangat Tinggi :  $\geq 91\%$
- 2) Tinggi : 76 – 90,99%
- 3) Sedang : 66 – 75,99%
- 4) Rendah : 51 - 65,99%
- 5) Sangat rendah :  $\leq 50,99$

Uraian berkenaan dengan pelaksanaan program adalah sebagai berikut :

**Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah**, memiliki 222 indikator kinerja program, seluruhnya dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi yaitu Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah pada seluruh SKPD pada 3 unit kerja Bappenda, Sekretariat Badan Pengelola Pendapatan Daerah, Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Blora dan Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan.

**Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**, memiliki 33 indikator kinerja program, seluruhnya dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi antara lain Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD.

**b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

Alokasi anggaran sejumlah Rp974.284.670.000,00, dilaksanakan oleh 41 Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (kecuali 4 RSUD dan 3 RSJD Provinsi Jawa Tengah) dengan realisasi fisik sebesar 98,90% dan keuangan 90,20%.

**Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah**, alokasi anggaran sejumlah Rp939.039.249.000,00 dengan realisasi fisik 98,90% dan keuangan 90,34% dilaksanakan di 41 Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan yang mendukung program tersebut, antara lain: Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Daerah; Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah; Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah; Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah; Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah; Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah; Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah; Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah; Kegiatan Penyediaan Sarana dan Kantor; Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah; Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas; Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal; Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah; Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan hasil terpenuhinya administrasi pelayanan di 41 Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah dengan hasil terselenggaranya koordinasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah dengan hasil terpenuhi dan terpeliharanya jaminan keamanan barang-barang/aset milik daerah.

**Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**, alokasi anggaran sejumlah Rp35.245.421.000,00 dengan realisasi fisik 98,71% dan keuangan 86,55%. Kegiatan yang mendukung program tersebut, antara lain: Kegiatan Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah dengan hasil dokumen perencanaan Perangkat Daerah dan Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah.

Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci sebagaimana Lampiran: L-II.D.1-176.

**c. Permasalahan dan Solusi**

**Permasalahan**

- 1) Belum adanya kesesuaian antara rencana pengadaan dan pemeliharaan barang modal pemerintah daerah (RKBMD dan RKPBMMD) dengan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan;
- 2) Belum optimalnya penganggaran diklat formal dalam peningkatan kapasitas ASN;
- 3) Web dan Medsos Perangkat Daerah belum dimanfaatkan sebagai media pelayanan informasi Perangkat Daerah secara maksimal;
- 4) Buku-buku dalam perpustakaan Perangkat Daerah belum dioptimalkan sebagai sarana bacaan yang mendukung kinerja Perangkat Daerah.

**Solusi**

- 1) Perlu adanya integrasi RKBMD dan RKPBMMD dengan system perencanaan dan penganggaran;
- 2) Adanya acuan perencanaan kebutuhan diklat formal dalam menentukan besaran anggaran;
- 3) Perlu adanya Regulasi Pemanfaatan Web/Medsos SKPD sebagai media pelayanan masyarakat dan surat menyurat wajib dengan paper less;
- 4) Inrichment dan Inlargement perpustakaan di masing-masing Perangkat Daerah sesuai keadaan era digital.